

ANALISIS KETERKAITAN ASPEK DEMOGRAFIS TERHADAP PENGUNAAN LAHAN DI KOTA DENPASAR

Ngakan Made Anom Wiryasa

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Udayana

Email: anomwiryasa@unud.ac.id

Abstrak: Peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan pariwisata di Kota Denpasar menyebabkan berkurangnya lahan sawah dan meningkatnya lahan bukan pertanian. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis keterkaitan aspek demografis terhadap penggunaan lahan Kota Denpasar dan merumuskan strategi jumlah penduduk dan penggunaan lahan di Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan melakukan analisis tren dan deskriptif komparatif. Hasil penelitian yaitu peningkatan jumlah penduduk Kota Denpasar cenderung meningkatkan penggunaan lahan bukan pertanian (khususnya pemukiman) dan menurunkan penggunaan lahan sawah selama kurun waktu 2011 sampai 2016. Hal tersebut karena meningkatnya kebutuhan pemukiman, belum adanya aturan RDTR dan zonasi, dan adanya aturan batasan ketinggian bangunan. Rumusan strategi yang dapat digunakan terkait jumlah penduduk dan penggunaan lahan di Kota Denpasar, yaitu Pemerintah Kota Denpasar harus konsisten dalam menegakkan peraturan, melakukan pengendalian penduduk, mulai merencanakan pengembangan bangunan vertikal dengan syarat tertentu agar tetap dapat mengakomodasi aturan batasan ketinggian bangunan, serta membuat aturan terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Kata kunci: jumlah penduduk, lahan sawah, lahan bukan sawah

ANALYSIS THE RELATION OF DEMOGRAPHIC ASPECT TO THE LAND USE OF DENPASAR CITY

Abstract: *The increasing of population and the rapid development of tourism in Denpasar cause the decreasing of paddy field and increase of non agriculture land. The purpose of this research is to analyze the relation of demographic aspect to the land use of Denpasar City and to formulate the strategy of population and land use in Denpasar City. The method used in this research is quantitative method by conducting trend analysis and comparative descriptive. The result of the research is increasing the population of Denpasar City tends to increase the use of non-agricultural land (especially settlement) and reduce the use of paddy field during the period 2011 to 2016. This is due to the increasing needs of settlements, the absence of RDTR and zoning rules, and the existence of building height restrictions. The formulation of strategies that can be used related to population and land use in Denpasar City, namely the Government of Denpasar must be consistent in enforcing regulations, controlling the population, start planning the development of vertical buildings with certain conditions in order to stay accommodate the rules of height limitation of the building, and make related rules protection of sustainable agricultural land.*

Keywords: *population, paddy fields, non-agriculture land*

PENDAHULUAN

Kota Denpasar adalah Ibukota Provinsi Bali yang pada awalnya memiliki luas wilayah sebesar 12.398 hektar. Saat ini, Kota Denpasar memiliki luas wilayah sebesar 12.778 hektar atau 2,27 persen dari luas wilayah Provinsi Bali. Bertambahnya luas wilayah tersebut didapatkan dari hasil reklamasi Pulau Serangan. Luas wilayah tersebut adalah yang terkecil dibandingkan dengan Kabupaten yang lainnya yang ada di Provinsi Bali. Kota Denpasar meskipun memiliki luas wilayah terkecil, namun memiliki jumlah penduduk terbesar diantara Kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Jumlah penduduk Kota Denpasar selama kurun waktu 2011 sampai 2013 terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kota Denpasar tahun 2011 sebesar 810.900 jiwa, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 846.200 jiwa pada tahun 2013 (Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2014).

Meningkatnya jumlah penduduk tersebut salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata. Pesatnya perkembangan pariwisata tidak dapat dihindarkan, karena Kota Denpasar masuk ke dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) dan menjadi Kota Inti Kawasan Sarbagita yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Hal tersebut menjadi salah satu pemicu pesatnya perkembangan pariwisata dan terciptanya lapangan kerja yang menyebabkan daya tarik bagi para pencari kerja, sehingga terjadi perpindahan penduduk (Trendyari dan Yasa, 2014). Hal tersebut terlihat dari jumlah penduduk yang bekerja di sektor pariwisata adalah yang terbesar dibandingkan sektor lainnya, hingga mencapai 170.855 pekerja pada tahun 2013 (Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2015).

Pesatnya perkembangan pariwisata dan pertumbuhan penduduk disatu sisi, dan sumber daya lahan yang terbatas disisi lain menimbulkan permasalahan pada pemanfaatan ruang Kota Denpasar. Permasalahan pemanfaatan ruang yang terjadi yaitu terjadinya alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah. Luas

lahan sawah terus berkurang dari 2.632 hektar pada tahun 2010 menjadi 2.506 pada tahun 2013 (Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2014). Berkurangnya lahan sawah tergantikan oleh meningkatnya lahan bukan pertanian dari 9.630 hektar pada tahun 2010 menjadi 9.756 pada tahun 2013 (Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2014). Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031, menyatakan bahwa adanya pelarangan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan budi daya bukan pertanian. Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya lahan sawah di Kota Denpasar telah dilindungi dengan Perda RTRW agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Tujuan penelitian ini yaitu (1) menganalisis keterkaitan aspek demografis terhadap penggunaan lahan Kota Denpasar dan (2) merumuskan strategi jumlah penduduk dan penggunaan lahan di Kota Denpasar.

KAJIAN PUSTAKA

Penataan Ruang

Penataan ruang adalah upaya aktif manusia untuk mengubah pola ruang dan struktur ruang untuk menuju pada keseimbangan yang lebih baik (Rustiadi *et al.*, 2011). Penataan ruang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencegah terjadinya konflik penggunaan ruang saat ini dan masa yang akan datang, mencegah penggunaan ruang yang tidak efisien, dan mencegah penggunaan lahan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan (Adisasmita, 2010). Penataan ruang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan UU tersebut, penataan ruang terdiri atas tiga proses yang saling berinteraksi satu sama lain. Ketiga proses tersebut, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Hubungan Demografis dengan Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dapat diartikan sebagai usaha manusia yang dilakukan

secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan hidup (materiil maupun spiritual) yang dipengaruhi oleh keadaan alam, sosial budaya, dan ekonomi suatu wilayah (Utoyo, 2012). Penggunaan lahan di perkotaan dapat ditentukan dengan beberapa kriteria, yaitu (Febriyanti dan Ariastita, 2013): (a) kriteria sosial demografi (jumlah penduduk dan tenaga kerja), (b) kriteria ekonomi (PDRB dan investasi), (c) kriteria institusi/kelembagaan (regulasi). Lahan yang paling sering mengalami alih fungsi di perkotaan adalah lahan pertanian, khususnya lahan sawah. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kondisi lahan, ketergusuran, (terhimpit pemukiman dan pertumbuhan penduduk) pemaanatan lahan untuk kepentingan sendiri (nilai jual lahan, biaya produksi, kebutuhan tempat tinggal), ketidakefektifan lahan (sarana jalan, saluran irigasi, dan peluang kerja di sektor lain) (Suputra *et al.*, 2012), faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan (lemahnya kelembagaan dan pelaksanaan rencana detail tata ruang) (Dewi dan Sarjana, 2015). Berdasarkan hal tersebut, kondisi demografis, baik itu jumlah penduduk dan tenaga kerja mempengaruhi penggunaan lahan, khususnya terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) di perkotaan. Menurut Syaifuddin *et al* (2013) hubungan jumlah penduduk dan alih fungsi lahan yaitu positif dan signifikan. Hal tersebut berarti peningkatan jumlah penduduk secara nyata menyebabkan peningkatan alih fungsi lahan. Hubungan jumlah penduduk terhadap lahan pertanian dan permukiman cenderung linier (Munibah *et al.*, 2009). Hal tersebut berarti pertambahan jumlah penduduk berpengaruh terhadap luas lahan pertanian dan pemukiman.

METODE PENELITIAN

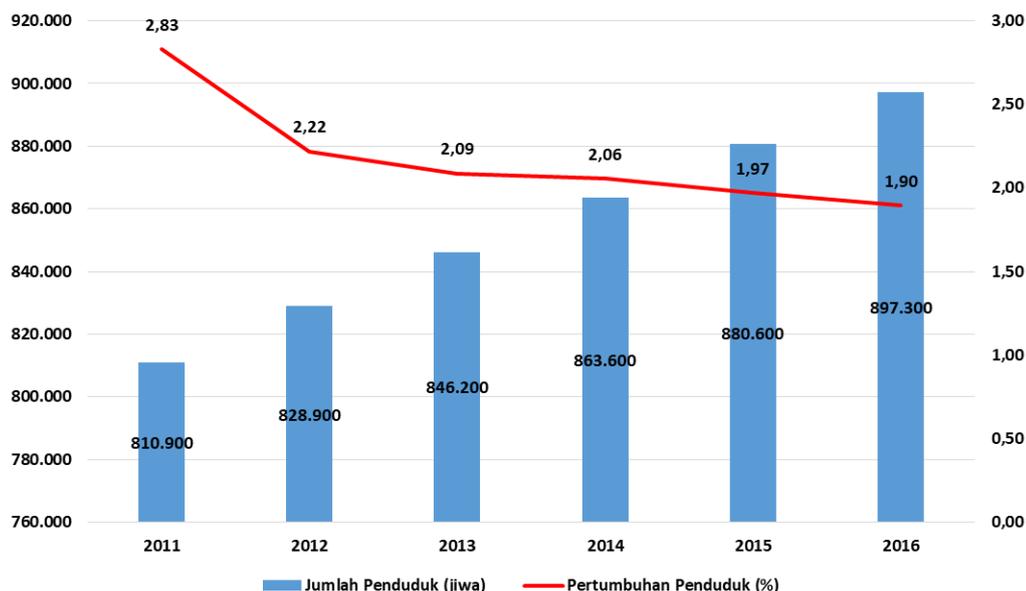
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Denpasar. Pengumpulan data didapatkan melalui dokumen instansi. Data yang dikumpulkan yaitu data jumlah

penduduk dan penggunaan lahan dari tahun 2011-2016. Data yang telah didapatkan kemudian akan dianalisis dengan analisis tren untuk melihat kecenderungan perkembangan yang terjadi selama kurun waktu 2011-2016. Tahap berikutnya yaitu melakukan analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan hasil tren jumlah penduduk dan penggunaan lahan tahun 2011-2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Demografis Kota Denpasar

Jumlah penduduk Kota Denpasar terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2016. Jumlah penduduk pada tahun 2011 sebesar 819.900 jiwa dan mengalami peningkatan menjadi 897.300 jiwa pada tahun 2016. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Denpasar dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, selain itu juga dipengaruhi oleh migrasi penduduk. Pada tahun 2015, penduduk yang masuk ke Kota Denpasar lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang keluar Kota Denpasar. Penduduk masuk ke Kota Denpasar sebesar 10.194 jiwa, sedangkan penduduk yang keluar Kota Denpasar sebesar 8.674 jiwa. Penduduk masuk ke Kota Denpasar lebih besar yang berasal dari dalam Provinsi Bali dibandingkan dengan dari luar Provinsi Bali. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Denpasar juga tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya sektor pariwisata dan kawasan perkotaan Sarbagita, sehingga menjadi daya tarik bagi para pencari kerja untuk bermigrasi ke Kota Denpasar. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata terus mengalami peningkatan dan menjadi yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata pada tahun 2011 yaitu 149.605 jiwa terus meningkat menjadi 220.739 jiwa pada tahun 2015 (Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2016).



Gambar 1. Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2011-2016
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2017

Tabel 1. Perpindahan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2015

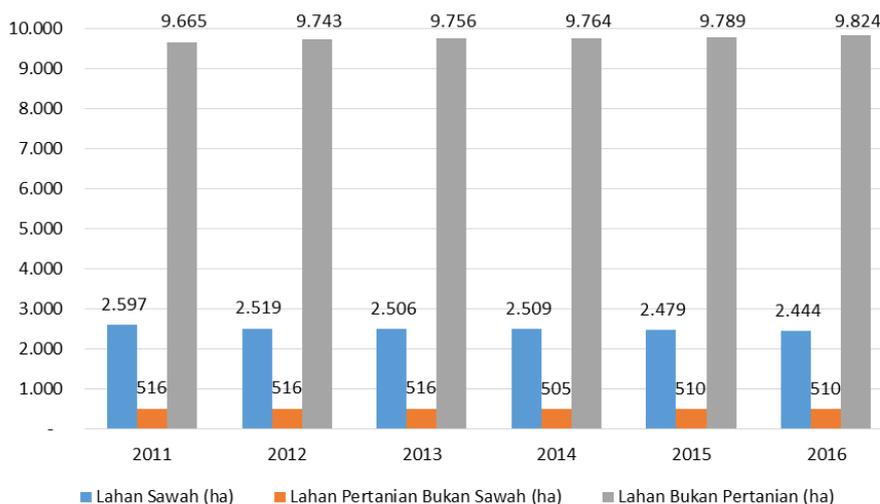
Nomor	Perpindahan Penduduk Kota Denpasar	Tahun 2015
1	Penduduk keluar Kota Denpasar antar kabupaten/kota dalam Provinsi Bali (jiwa)	4.792
2	Penduduk Kota Denpasar keluar Provinsi Bali (jiwa)	3.882
Total penduduk keluar Kota Denpasar (jiwa)		8.674
3	Penduduk masuk Kota Denpasar antar kabupaten/kota dalam Provinsi Bali (jiwa)	5.316
4	Penduduk masuk Kota Denpasar dari luar Provinsi Bali (jiwa)	4.878
Total penduduk masuk Kota Denpasar (jiwa)		10.194

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2016

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar

Kota Denpasar telah memiliki dokumen perencanaan tata ruang. Dokumen perencanaan tata ruang yang dimiliki Kota Denpasar yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2031. Namun, Kota Denpasar belum memiliki dokumen turunan dari RTRW, yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi. Kedua dokumen yaitu RDTR dan zonasi sangat diperlukan sebagai dokumen operasional dari RTRW, agar penggunaan lahan yang terjadi sesuai

dengan apa yang telah direncanakan. Dalam RTRW Kota Denpasar, penggunaan lahan untuk kawasan lindung direncanakan seluas 1.011,09 hektar atau 7,91 persen dari luas Kota Denpasar. Sedangkan, kawasan budidaya direncanakan seluas 11.766,91 hektar atau 92,09 persen dari luas wilayah Kota Denpasar. Kawasan budidaya yang terbesar yaitu untuk fungsi pemukiman. Selain itu, kawasan untuk fungsi pariwisata dan sawah juga mendominasi kawasan budidaya yaitu seluas 2.437,18 hektar dan 1.563,52 hektar.



Gambar 2. Penggunaan Lahan Kota Denpasar Tahun 2011-2016
 Sumber: BPS Kota Denpasar, 2017

Penggunaan Lahan Kota Denpasar

Penggunaan lahan di Kota Denpasar terdiri atas penggunaan lahan sawah, lahan pertanian, dan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan sawah selama kurun waktu 2011 sampai 2016 cenderung mengalami penurunan. Luas lahan sawah pada tahun 2011 yaitu 2.597 hektar cenderung menurun menjadi 2.444 hektar pada tahun 2016. Lahan sawah cenderung beralih fungsi menjadi lahan bukan pertanian, khususnya menjadi lahan pemukiman. Luas lahan sawah sempat mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 3 hektar. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya alih fungsi dari lahan pertanian bukan sawah menjadi lahan sawah, namun disatu sisi tetap terjadi alih fungsi dari lahan sawah menjadi lahan bukan pertanian. Lahan pertanian bukan sawah cenderung mengalami penurunan dari 516 hektar pada tahun 2011 menjadi 510 hektar pada tahun 2016. Kecenderungan penurunan yang terjadi pada lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah berbanding terbalik dengan cenderung meningkatnya lahan bukan pertanian, khususnya untuk fungsi pemukiman. Luas lahan bukan pertanian meningkat dari 9.665 hektar pada tahun 2011 menjadi 9.824 hektar.

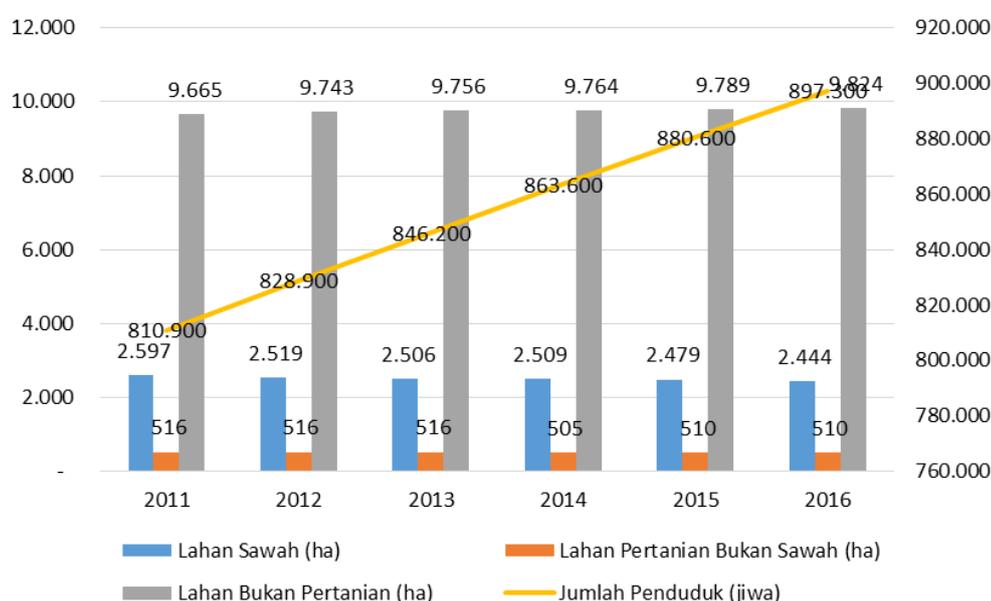
Analisis Demografis Terhadap Penggunaan Lahan di Kota Denpasar

Peningkatan jumlah penduduk Kota Denpasar cenderung linier terhadap penggunaan lahan di Kota Denpasar, khususnya terkait dengan lahan sawah dan lahan bukan pertanian. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3, yaitu jumlah penduduk Kota Denpasar terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2011 sampai 2016. Peningkatan jumlah penduduk Kota Denpasar cenderung meningkatkan penggunaan lahan bukan pertanian (khususnya pemukiman) dan menurunkan penggunaan lahan sawah selama kurun waktu 2011 sampai 2016. Hal tersebut berarti meningkatnya jumlah penduduk di Kota Denpasar akan meningkatkan kebutuhan akan pemukiman. Namun, disatu sisi sumber daya lahan yang ada di Kota Denpasar terbatas sehingga untuk mengatasi kebutuhan pemukiman cenderung mengakibatkan berkurangnya luasan lahan sawah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Munibah *et al* (2009), yang menyatakan bahwa hubungan jumlah penduduk terhadap lahan pertanian dan permukiman cenderung linier. Hal tersebut berarti pertambahan jumlah penduduk berpengaruh terhadap luas lahan pertanian dan pemukiman.

Dilihat dari sisi tata ruang, sebenarnya alih fungsi lahan pertanian (sawah) telah dilarang di dalam dokumen RTRW Kota Denpasar 2011-2031. Pada dokumen RTRW tersebut menyebutkan bahwa adanya pelarangan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan budi daya bukan pertanian. Dalam rangka melindungi lahan pertanian (sawah) yang ada di Kota Denpasar, Pemerintah Kota telah mengeluarkan insentif dalam bentuk Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/724/HK/2016 Tentang Pemberian Kompensasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang tanahnya ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau kota (RTHK) Pertanian (sawah ekowisata dan sawah murni) di Kota Denpasar. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk melindungi lahan pertanian (sawah) yang ada di Kota Denpasar, namun masih terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi lahan bukan sawah. Alih fungsi yang terjadi juga berkaitan

dengan adanya aturan di dalam RTRW Kota Denpasar yaitu batas ketinggian bangunan maksimal 15 meter dari rata-rata permukaan tanah asal di lokasi bangunan tersebut. Sehingga pembangunan yang terjadi di Kota Denpasar cenderung ke arah horizontal yang berpengaruh terhadap berkurangnya luasan lahan sawah. Selain itu, belum adanya aturan RDTR dan zonasi sebagai aturan operasional dari RTRW juga akan mempengaruhi menurunnya lahan sawah.

Rumusan strategi yang dapat digunakan terkait jumlah penduduk dan penggunaan lahan di Kota Denpasar, yaitu Pemerintah Kota Denpasar harus konsisten dalam menegakkan peraturan, melakukan pengendalian penduduk, mulai merencanakan pengembangan bangunan vertikal dengan syarat tertentu agar tetap dapat mengakomodasi aturan batasan ketinggian bangunan, serta membuat aturan terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.



Gambar 3. Perbandingan Jumlah Penduduk dan Penggunaan Lahan di Kota Denpasar Tahun 2011-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2017

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peningkatan jumlah penduduk Kota Denpasar cenderung meningkatkan penggunaan lahan bukan pertanian (khususnya pemukiman) dan menurunkan penggunaan lahan sawah selama kurun waktu 2011 sampai 2016. Hal tersebut karena meningkatnya kebutuhan pemukiman, belum adanya aturan RDTR dan zonasi, dan adanya aturan batasan ketinggian bangunan.
2. Rumusan strategi yang dapat digunakan terkait jumlah penduduk dan penggunaan lahan di Kota Denpasar, yaitu Pemerintah Kota Denpasar harus konsisten dalam menegakkan peraturan, melakukan pengendalian penduduk, mulai merencanakan pengembangan bangunan vertikal dengan syarat tertentu agar tetap dapat mengakomodasi aturan batasan ketinggian bangunan, serta membuat aturan terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2010. *Pembangunan kawasan dan tata ruang*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. 2014. *Denpasar Dalam Angka 2014*. BPS Kota Denpasar. Denpasar.
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. 2014. *Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota Denpasar*. BPS Kota Denpasar. Denpasar.
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. 2015. *Denpasar Dalam Angka 2015*. BPS Kota Denpasar. Denpasar.
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. 2016. *Denpasar Dalam Angka 2016*. BPS Kota Denpasar. Denpasar.
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. 2017. *Denpasar Dalam Angka 2017*. BPS Kota Denpasar. Denpasar.
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. 2017. *Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota Denpasar*. BPS Kota Denpasar. Denpasar.
- Dewi, I. A. L., & Sarjana, I. M. 2015. *Faktor-faktor pendorong alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian (kasus: subak kerdung, kecamatan Denpasar selatan)*. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 3, 2.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. 2016. *Agregat Kependudukan Kota Denpasar Semester I dan II Tahun 2015*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Denpasar.
- Febriyanti, A. D., & Ariastita, P. G. 2013. *Optimasi penggunaan lahan perkotaan di kawasan perkotaan Mejayan Kabupaten Madiun*. *Jurnal Teknik Pomits*, 2, 2.
- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/724/HK/2016 Tentang Pemberian Kompensasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (PBB P2) yang Tanahnya Ditetapkan Sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Pertanian (Sawah Ekowisata dan Sawah Murni) di Kota Denpasar. Denpasar: 28 Juni 2016.
- Munibah, K. Sitorus, S. R. P. Rustiadi, E. Gandasmita, K. Hartrisari. 2009. *Model Hubungan Antara Jumlah Penduduk Dengan Luas Lahan Pertanian dan Permukiman (Studi Kasus DAS Cidanau, Provinsi Banten)*. *Jurnal Tanah dan Lingkungan*, 11, 1.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031. Denpasar: 30 Desember 2011.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. 2011. *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Crestpent Press. Jakarta.
- Suputra, D. P. A., Ambarawati, I. G. A. A., & Tenaya, I. M. N. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan studi kasus di subak daksina, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung*. *E-Journal Agribisnis dan Agrowisata*, 1, 1.
- Syaifuddin. Hamire, A. Dahlan. 2013. *Hubungan Antara Jumlah Penduduk Dengan Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. *Jurnal Agrisistem*, 9, 2.
- Trendyari, A. A. T. dan Yasa, I. N. M. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Masuk Ke Kota*

Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi
Pembangunan Universitas Udayana*, 1,
10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Jakarta: 26 April 2007.

Utoyo, B. 2012. *Dinamika penggunaan
lahan di daerah perkotaan (studi di
Kota Bandar Lampung). Makalah
disampaikan pada seminar hasil-hasil
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat-dies natalis FISIP Unila.*
Lampung.